



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN DELEGASI DPR RI KE THE 16th GENERAL ASSEMBLY OF THE ASIA PACIFIC PARLIAMENTARIANS' CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (APPCED) 14-18 Januari 2013, Kathmandu - Nepal

I. PENDAHULUAN

The 16th Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED) berlangsung pada tanggal 14 – 18 Januari 2013 bertempat di Hyatt Hotel di Kathmandu – Nepal.

Sidang yang mengambil tema “*Economic Development and Environmental Challenges*” dihadiri oleh 13 parlemen dari 46 negara anggota APPCED. Negara APPCED yang hadir adalah China, India, Indonesia, Iran, Korea Selatan, Malaysia, Maladewa, Thailand, Solomon Islands, Filipina, Mongolia, Sri Lanka dan Nepal. Selain itu, sidang dihadiri para expert dari UNEP/ROAP, ICIMOD, KEITI.

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Pengiriman Delegasi DPR RI ke Sidang ke-16 APPCED berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PIMP/III/2012-2013 tanggal 7 Januari 2013.

B. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terdiri dari:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Juhaini Alie, SH, MM | Ketua Delegasi/FPD |
| 2. Tantowi Yahya | Anggota Delegasi/FPG |

Selama mengikuti persidangan, Delegasi didampingi oleh 2 (dua) orang Pejabat KBRI Bangladesh, Tenaga Ahli BKSAP dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI

- Untuk memenuhi undangan Pemerintah Nepal dan President APPCED.
- Untuk saling berbagi pengalaman terbaik dan meningkatkan kerja sama dan kontribusi peran diplomasi parlemen Asia Pasifik dalam membahas isu-isu yang menjadi *concern* bersama.

D. MISI DELEGASI

Misi Delegasi DPR-RI dalam pertemuan APPCED ke-16 kali ini adalah:

- Untuk memperkuat peran diplomasi DPR RI dalam forum parlemen di kawasan Asia Pasifik.
- Sebagai wujud peran aktif DPR RI terkait keanggotannya dalam forum *APPCED* untuk membahas tema dan isu-isu yang menjadi agenda pembicaraan pertemuan.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN

Serangkaian persiapan telah dilakukan dalam menghadapi Sidang *APPCED* ini. Setelah Pimpinan DPR RI memberikan persetujuannya untuk mengirim delegasi, dilanjutkan dengan mengadakan rapat Delegasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2013 untuk mendapatkan masukan dari instansi-instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementrian Lingkungan Hidup.

II. ISI LAPORAN

A. JALANNYA PERSIDANGAN

a. *Executive Committee Meeting*

Sidang ke-14 *Executive Committee* diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 2013 sebelum *Opening Ceremony*, yang dibuka dengan sambutan dari Hon. James Dawos Mamit, *Vice President of APPCED* dan Hon. Mahalaxmi Upadhyay Dina, *Secretary General of APPCED*. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan

delegasi dari China, India, Indonesia, Iran, Korea Selatan, Malaysia, Maladewa, Thailand, Solomon Islands, Sri Lanka, Mongolia, Nepal dan Filipina.

Agenda yang dibahas dalam Excom antara lain :

- Pembacaan *minutes of meeting* dari *The 13th APPCED EXCOM Meeting* oleh *Secretary General of APPCED*.
- Adopsi Program *The 16th General Assembly of APPCED*.
- *Selection of the Chair of the General Assembly*, Dr. Keshav Man Shakya, *the Minister for Science and Technology Nepal*.
- *Selection of the Chair of Drafting Committee*, yang kemudian memilih mantan Ketua Parlemen Nepal.
- Pemilihan *President* dan *Vice Presidents of APPCED* yang baru.
- Pemilihan tuan rumah *General Assembly* ke-18 *APPCED*, yaitu Thailand dan *General Assembly* ke-17 *APPCED* akan diadakan di Iran pada bulan April 2014.

Isu lainnya yang dibahas antara lain tentang Reforestasi, dimana pada kesempatan tersebut Delegasi Korea membagi pengalaman tentang bagaimana upaya Korea dalam mengurangi kerusakan lingkungan dan mengupayakan reforestasi, yaitu dengan upaya penanaman kembali dalam skala nasional, didukung oleh hari nasional *tree-planting day*. Delegasi Thailand mengusulkan agar *General Assembly APPCED* membahas mengenai reforestasi tanpa penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Isu tersebut diterima sebagai masukan.

b. *Opening Ceremony*

Sidang secara resmi dibuka oleh Perdana Menteri Nepal, Dr. Babu Ram Bhattarai yang sekaligus menjadi *keynote speaker* pada kesempatan tersebut. Acara diawali dengan sambutan dari Hon. Mahalaxmi Upadhyay Dina, *Secretary General of APPCED* yang menyampaikan beberapa hal mengenai sejarah terbentuknya APPCED tahun 1993 yang diinisiasi oleh Korea. Beliau juga menyampaikan pentingnya pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga kelestarian alam. Perubahan iklim juga telah membawa tantangan tersendiri bagi penduduk Nepal. Adaptasi terhadap lingkungan merupakan salah satu agenda nasional Nepal. Diskusi mengenai isu tersebut tidak

dapat hanya dilakukan dalam dua hari konferensi APPCED, tetapi harus diimplementasikan secara kontinyu di setiap negara anggota.

Agenda dilanjutkan dengan sambutan dari Mr. Deependra Bahadur Kshetry, *Vice Chairman, National Planning Commission*, Nepal. Pemerintah Nepal mendukung program *green development* dan *clean environment*. Pengentasan kemiskinan juga merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk didalamnya adalah *food security* dan ketersediaan energi. *People-centered* dan *inclusive* adalah prinsip-prinsip yang dikedepankan oleh pemerintah Nepal. Kemiskinan, bencana alam, kerusakan alam, berkurangnya Sumber Daya Air, migrasi, adalah tantangan global. Manajemen *biological resources* juga harus diupayakan dalam gerakan pembangunan berkelanjutan. Adaptasi dan mitigasi resiko perubahan iklim juga harus diperhitungkan. Negara donor dan NGO memiliki peranan besar dalam mendukung tercapainya upaya pembangunan berkelanjutan.

Dalam sambutannya Presiden APPCED, Hon. Mr. Lee Ju Young menyampaikan pembangunan ekonomi dan tantangan ekonomi merupakan isu vital yang kita hadapi sehari-hari. Ketika dihadapi secara bersamaan, maka tantangan semakin besar. Perubahan iklim merubah *landscape*, termasuk diantaranya kenaikan ketinggian air laut, deforestasi, dan desertifikasi, telah mempengaruhi banyak orang. Perlindungan lingkungan adalah salah satu elemen penting yang ditekankan dalam Rio+20. Negara berkembang harus berjuang dalam membangun ekonomi. Ada dorongan kuat bagi komunitas internasional untuk menjawab kedua tantangan tersebut secara bersamaan, termasuk diantaranya dengan keterlibatan parlemen baik secara regional maupun internasional. Fungsi legislasi ditekankan dalam upaya perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Peserta yang hadir dalam Sidang Umum APPCED memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam Sidang Umum APPCED ke 16.

Dalam sambutannya Perdana Menteri Nepal mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta. Konferensi ini akan mempererat kerjasama antar parlemen. Peran legislatif parlemen amat penting dalam menyusun kebijakan yang

mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjawab tantangan perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Pemerintah Nepal mengintegrasikan kebijakan pembangunan lingkungan dan manajemen Sumber Daya Alam dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah Nepal menginisiasi *national framework of action* dalam mengimplementasikan agenda pembangunan berkelanjutan dan mengintegrasikan pengentasan kemiskinan, prinsip perlindungan lingkungan, dan pembangunan. Adaptasi juga merupakan hal yang ditekankan oleh Pemerintah Nepal, termasuk dalam hal *food security*. Pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan merupakan prioritas Pemerintah Nepal dan implementasinya harus mampu menyediakan lapangan kerja. Dampak perubahan iklim bersifat lintas batas negara, sehingga kerjasama kawasan Asia Pasifik harus dipererat.

Hon. Kesha Man Shakya, *Minister for Science, Technology and Environment* Nepal menyampaikan pidato penutupan dengan menekankan bahwa perusakan lingkungan, kemiskinan, dan kelaparan merupakan tantangan bagi isu sosial ekonomi di tingkat global. Pemerintah Nepal memiliki *Environmental Act* 1996 dan 1997 yang dianggap sebagai landasan kebijakan lingkungan Nepal. Penggunaan energi terbarukan dan perubahan iklim merupakan isu-isu penting yang diakomodasi dalam. *Interim Constitution of Nepal* menggarisbawahi pentingnya pengimplementasian prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. *Rural energy policy* diluncurkan pada 2006. Nepal aktif berkontribusi di tingkat internasional. Perubahan iklim dan perusakan lingkungan memiliki sifat lintas batas negara sehingga diperlukan kerjasama regional untuk memastikan ketersediaan sumber daya lingkungan dan energi bagi pembangunan.

c. *First Plenary*

Sidang diisi dengan penyampaian *Country Report* dari masing-masing negara anggota APPCED :

1) *Delegasi China*

China National People's Congress (NPC) mengedepankan langka pragmatis dalam mengupayakan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan

sebagai tantangan bagi kawasan Asia Pasifik. Pelestarian ekologi lingkungan merupakan salah satu hal yang ditekankan. Beberapa langkah penting yang diupayakan NPC antara lain mempererat kerjasama internasional dalam isu perubahan iklim. NPC dan Pemerintah China telah meluncurkan serangkaian kebijakan sebagai respon terhadap perubahan iklim. Pada 2009, NPC meluncurkan "*Decision to actively respond to climate change*". Langkah berikutnya adalah mengimplementasikan praktik praktik hemat energi dan pengurangan emisi untuk melestarikan ekologi. Upaya pengurangan polutan telah diintegrasikan dalam "*11th Five Year Plan*". Langkah penting lainnya adalah dengan mengimplementasikan kerjasama pragmatis dalam energi internasional. Pembangunan dan pengembangan energi merupakan prioritas China dalam menyusun kebijakan, termasuk diantaranya mengupayakan penggunaan energi terbarukan. Sumber daya energi akan meningkatkan standar hidup masyarakat.

2) Delegasi India

India merupakan salah satu ekonomi terkuat di Asia Selatan dengan rata-rata pertumbuhan 9% per tahun. India telah mengalami transformasi dari *agriculture oriented* menjadi *service and industry oriented*. India juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim, terutama terhadap sektor pertanian dan kehutanan. India termasuk salah satu negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim, terutama dari kenaikan permukaan air laut. Negara berkembang memiliki kebutuhan untuk mengurangi kemiskinan, salah satu polutan terbesar bagi upaya pembangunan dan MDGs. India berupaya untuk meningkatkan upaya *human development*. *Self sufficiency* dalam industri strategis diupayakan seiring dengan upaya untuk menyediakan lapangan kerja. India merupakan salah satu negara di dunia yang lebih dahulu mengimplementasikan upaya pelestarian *biodiversity*. *Energy security* merupakan upaya lain yang ditekankan India. Tenaga matahari merupakan salah satu energi alternatif yang dikembangkan. *Green India project* merupakan upaya reforestasi yang dilakukan oleh pemerintah India. Kementerian kehutanan memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan pelestarian lingkungan yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan. India

memiliki kekayaan alam biologis. Pertumbuhan ekonomi harus dapat diraih tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

3) Delegasi Iran

Sinergi antara pembangunan dan pelestarian lingkungan sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan stabilitas sosial dan ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan telah diperkenalkan sejak 1980-an sebagai respon terhadap konsep pembangunan konvensional yang tidak dapat menjawab permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Dibutuhkan lebih dari satu aspek atau dimensi dalam menjawab tantangan pembangunan. Mempertahankan standar pelestarian lingkungan diperlukan dalam mengupayakan stabilitas lingkungan dan stabilitas sosial. Komunitas global harus memiliki komitmen dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pembangunan sosial merupakan tiga elemen yang saling berhubungan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Manajemen sumber daya air merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4) Delegasi Korea

Korea pada awalnya merupakan negara yang hancur akibat perang Korea 1950-1953 namun sekarang merupakan salah satu negara pelopor *green economy*. Dalam proses pembangunannya, pendapatan per kapita masyarakat Korea meningkat secara progresif. Selama proses tersebut, Korea mengalami kerusakan lingkungan. Oleh karena itu Korea menerapkan peraturan yang ketat mengenai pelestarian lingkungan, salah satunya melalui insentif ekonomi untuk mendukung R&D dalam teknologi ramah lingkungan. Korea merupakan negara yang padat penduduk. Selama kurun waktu 1960an-1997, pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 8,4%. Pada periode 1970-1980-an, urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan degradasi lingkungan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah deforestasi yang ditangani sejak tahun 1967 melalui upaya pelestarian hutan dan program penanaman pohon. Industrialisasi di sektor industri kimia, tekstil, dan elektronik juga berakibat pada meningkatnya

limbah cair yang tidak ditangani dengan baik. Konsumsi energi batubara dan BBM bersulfur tinggi meningkat secara signifikan dan menyebabkan polusi udara. Pencemaran air sungai juga merupakan masalah utama yang menyebabkan gangguan kesehatan. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, Korea meluncurkan *Environmental Preservation Act 1977*. Paradigma manajemen lingkungan mulai berubah pada tahun 2000-an, yaitu mengintegrasikan isu-isu berkelanjutan dan harmonisasi politik antara pembangunan dan lingkungan, dari pengaturan sumber polusi menjadi pencegahan dan pengurangan resiko polusi. Prinsip pembangunan Korea saat ini adalah *low carbon, green growth*.

5) Delegasi Malaysia

Pertumbuhan ekonomi per tahun sekitar 7% dari industri jasa dan GDP 58,6%. Sektor manufaktur menyumbang pertumbuhan sebesar 4,7% dan GDP 27,5%. Malaysia menghadapi tantangan dari meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat industrialisasi. Sektor pertanian tumbuh 5,8% per tahun dengan GDP 7,3%. Degradasi lingkungan terjadi akibat pembersihan lahan dan proses penanaman. Sektor pertambangan tumbuh 5,7% per tahun. Sektor konstruksi menyumbang pertumbuhan ekonomi 4,6% dan GDP 3,2%. Tantangan yang timbul antara lain sedimentasi sungai. Salah satu penyebab polusi di Malaysia adalah kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, kehilangan biodiversitas, dan erosi. Beberapa kebijakan yang dicanangkan adalah *Environmental Quality Act 1974*. Target Malaysia adalah menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020 didukung oleh pengintegrasian program pelestarian lingkungan dalam proses pembangunan.

6) Delegasi Maladewa

Maladewa adalah negara kepulauan dengan luas 300 km persegi dan menghadapi tantangan dari meningkatnya resiko dampak perubahan iklim. Ketinggian permukaan daratan Maladewa adalah antara 0-3 m dari permukaan laut. Peningkatan permukaan laut menjadi masalah utama bagi Maladewa dimana 80% area nya terletak kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Erosi pantai terjadi di lebih dari 55% garis pantai. Apabila Maladewa tenggelam, maka dunia menghadapi kegagalan dalam upaya menangani

perubahan iklim. Maladewa rawan terhadap banjir yang diakibatkan oleh ombak laut. Peningkatan suhu air laut mempengaruhi kesehatan batu karang. Karena keterbatasan produktifitas, kebutuhan pangan Maladewa sangat tergantung pada produk impor. Apabila bencana alam terjadi di negara tetangga, maka akan mengganggu transportasi bahan pangan ke Maladewa. Perubahan iklim juga berpengaruh terhadap kesehatan. Mitigasi dan adaptasi merupakan upaya penting dalam merespon perubahan iklim, termasuk melalui peningkatan ketahanan masyarakat dan tourism adaptation program. Upaya mitigasi Maladewa banyak di dukung oleh bantuan luar negeri Jepang. Keterbatasan regulasi masih menjadi hambatan.

7) Delegasi Nepal

Nepal memiliki populasi sekitar 26 juta jiwa. Populasi urban mencapai 17% dengan harapan hidup 65 tahun. Ranking ke-25 dalam hal biodiversitas dunia, memiliki 39% hutan. Angka kemiskinan mencapai lebih dari 20%. Tantangan yang dihadapi antara lain sumber daya finansial dan kurangnya kewaspadaan masyarakat. Hak yang berhubungan dengan lingkungan dan kesehatan masyarakat diatur dalam Konstitusi. Nepal memberikan perhatian terhadap upaya konservasi lingkungan. Agenda pembangunan berkelanjutan diatur sejak 2003. Pada 2011, Nepal meluncurkan kebijakan perubahan iklim. Rencana pembangunan mulai diagendakan sejak 1956 dengan program konservasi tanah dan air. Sejak tahun 1997, isu lingkungan terintegrasi dalam kebijakan pembangunan. Nepal telah meratifikasi 21 konvensi internasional yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Perubahan iklim menjadi isu penting bagi Nepal sebagai negara riskan perubahan iklim no. 4 di dunia. Terjadi kenaikan 0,06 derajat Celsius per tahun dalam periode 1977-1994.

8) Delegasi Mongolia

Mongolia memiliki luas wilayah 10 kali luas wilayah Nepal namun dengan jumlah populasi sangat rendah. Mongolia memiliki luas hutan 2% karena cuaca dan iklim yang ekstrem. Karena *global warming*, Mongolia menghadapi ancaman desertifikasi. Selama 3 tahun terakhir, ekonomi Mongolia tumbuh pesat mencapai 10% per tahun. Sektor pertambangan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi, namun menyebabkan kerusakan lingkungan.

40% penduduk tinggal di ibukota. Mongolia akan berpartisipasi dalam acara APPCED selanjutnya di masa mendatang sebagai salah satu upaya untuk menyelaraskan upaya pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

9) Delegasi Filipina

Tantangan lingkungan utama yang dihadapi antara lain bagaimana meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, meningkatkan kualitas lingkungan, dan upaya konservasi. Sistem biodiversitas dan ekosistem menargetkan upaya konservasi. Udara bersih, air bersih, dan manajemen limbah padat merupakan target pencapaian kualitas lingkungan. Upaya lainnya adalah menahan laju deforestasi dan laju degradasi hutan diirangi dengan upaya penghijauan. Hampir 300 ribu hektar lahan telah ditanam ulang melalui program penghijauan dan menyumbangkan peningkatan jumlah lapangan kerja. Area penghijauan selama periode 2010-2011 meningkat sebanyak 150%. Area vegetasi meningkat secara gradual. Hasil *illegal logging* disumbangkan untuk membangun sarana pendidikan/sekolah. Mengenai populasi udara, terjadi penurunan jumlah polutan di Metro Manila. *River program* sukses merubah sungai yang tercemar menjadi sungai yang bersih dan hijau serta menghilangkan pemukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai. Selama tahun 2011, Filipina mencanangkan program pembersihan sungai yang turut diikuti oleh masyarakat setempat. Upaya lainnya adalah dengan manajemen limbah padat. Sebagai upaya pencegahan bencana, Filipina melakukan *geohazard assessment and mapping*. *Survey Pulse Asia* mengakui keberhasilan upaya pemerintah Filipina dalam menghentikan perusakan lingkungan. Kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di Filipina terus meningkat.

10) Delegasi Solomon Islands

Terletak di kawasan Pasifik, meraih kemerdekaan dari Britania Raya pada tahun 1978. Terdiri dari 9 provinsi dengan populasi 584 ribu jiwa. Sektor unggulan antara lain perikanan dan pertambangan mineral. Tantangan utama adalah erosi pantai, terutama di bagian barat Kepulauan Solomon. Banjir juga merupakan masalah utama yang mengganggu pertumbuhan ekonomi. Kenaikan permukaan air laut juga menyebabkan intrusi air laut ke daratan di

beberapa wilayah. Pertambangan telah menjadi salah satu sumber kerusakan lingkungan. Akibat perubahan iklim juga mengakibatkan angin topan. Upaya yang dilakukan antara lain perencanaan manajemen limbah padat, kebijakan nasional perubahan iklim, dan rencana pengurangan resiko bencana. Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan prinsip pelestarian lingkungan dengan pembangunan. Proyek mitigasi dibiayai oleh negara-negara dan donor dan organisasi internasional (ADB, World Bank, UNDP, dll). Kepulauan Solomon mengupayakan kebijakan untuk beralih pada energi panas bumi (geotermal) namun masih terkendala kurangnya regulasi. Program lainnya adalah relokasi penduduk yang tinggal di pulau-pulau dengan ketinggian dari permukaan laut yang rendah. Isu lain yang diupayakan adalah *carbon trading* dan pengurangan emisi dari penebangan hutan dan degradasi lingkungan.

11) Delegasi Sri Lanka

Sri Lanka memiliki kekayaan *biodiversity* dan sumber daya alam. Sri Lanka adalah negara berpendapatan menengah dengan pertumbuhan ekonomi 8,3% selama beberapa tahun terakhir. Target kedatangan turis asing 2,5 juta pada 2020. Salah satu pendapatan tertinggi berasal dari sektor pariwisata yang perlu didukung oleh kondisi lingkungan. Tingkat pengangguran mencapai 3,2%. Target Sri Lanka adalah menjadikan negara tersebut sebagai tujuan pariwisata utama di dunia. Sektor pembangunan utama berasal dari sektor energi dan konstruksi. Deforestasi, degradasi lahan, pertambangan pasir, adalah beberapa masalah utama yang dihadapi Sri Lanka. Tantangan lain yang dihadapi adalah polusi udara, perubahan iklim, polusi air tanah, polusi air laut. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan meluncurkan regulasi mengenai upaya pelestarian lingkungan/*national environmental act*. Sri Lanka menyadari pentingnya pembangunan yang seimbang dengan pelestarian lingkungan.

12) Delegasi Thailand

Parlemen dan pemerintah Thailand bekerjasama dalam menjawab tantangan pembangunan dan lingkungan dalam prinsip *good governance*. Terdapat 11 prinsip pembangunan berkelanjutan, yang diprioritaskan pada kecukupan ekonomi. Thailand memiliki kepentingan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan komitmen dalam kerangka konvensi internasional. Sektor

infrastruktur dan sektor industri kreatif akan menjadi salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Tantangan lingkungan yang dihadapi antara lain: dampak perubahan iklim, yang telah terintegrasi dalam rencana atau kebijakan pembangunan nasional, termasuk mitigasi, adaptasi terhadap perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca (70% berasal dari sektor industri). Beberapa upaya yang dilakukan: peningkatan penggunaan energi terbarukan, pengurangan penggunaan energi, pengurangan laju deforestasi pada 2020. Upaya penanganan dampak perubahan iklim telah diadopsi oleh berbagai institusi nasional. Sektor pertanian, sebagai tulang punggung perekonomian Thailand, memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Dalam hal *capacity building*, pendistribusian informasi mengenai dampak perubahan iklim terus diupayakan melalui pendidikan. Upaya lainnya adalah R&D dalam penanganan resiko bencana. Thailand menekankan pentingnya kerjasama regional, multilateral, maupun bilateral dalam menyukseskan program pembangunan di negara-negara anggota APPCED.

d. *Expert Presentation and Panel Discussion*

Pada hari kedua, Sidang mendengarkan dan membahas paparan dari para pakar antara lain :

1) Dr. Madhav Karki, Deputy Director General, ICIMOD, yang menyampaikan beberapa poin antara lain :

- Kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara memiliki sumber kekayaan alam namun memiliki kelemahan dalam hal pembangunan perekonomian dan pelestarian alam.
- Suhu bumi secara global diperkirakan meningkat antara 1,4 hingga 5,8 derajat Celcius pada 2100. Wilayah Himalaya akan menjadi wilayah yang paling banyak terkena dampak atau dipengaruhi oleh perubahan iklim.
- Jumlah bencana alam di berbagai negara semakin meningkat, terutama banjir yang mengakibatkan kerugian ekonomi.
- Pembangunan yang tidak terencana dan perubahan iklim menjadi kombinasi yang buruk dalam meningkatkan resiko bencana.
- Berkurangnya glacier menyebabkan resiko berkurangnya sumber daya air dan meningkatnya bencana alam.

- Ketersediaan sumber daya air pegunungan merupakan hal yang krusial untuk mendukung berbagai aktifitas kehidupan.
- Permasalahan pada sumber daya air menimbulkan dampak negatif pada ketahanan pangan global.
- Aktifitas manusia di kaki pegunungan menyebabkan terjadinya erosi dan kerusakan lahan.
- Tanpa skenario *green economy*, laju perusakan hutan pada 2020 akan semakin meningkat.
- Tantangan terbesar yang dihadapi secara global adalah pengentasan kemiskinan.
- Upaya adaptasi terhadap perubahan iklim harus dimulai dari sekarang, diantaranya dengan mengintegrasikan upaya pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
- Hampir semua upaya pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan iklim.
- Diperlukan upaya konservasi ekosistem dan adaptasi perubahan iklim yang bersifat lintas batas negara.
- Memanfaatkan pengetahuan lokal dan teknologi pengetahuan dalam membangun ketahanan masyarakat.
- Upaya pelestarian hutan harus melibatkan banyak pemangku kepentingan.
- Pembangunan kapasitas adalah kunci dalam merespon perubahan iklim dan tantangan pembangunan.
- Aplikasi geospasial dapat membantu dan memperbaiki proses pengambilan keputusan.

2) **Dr. Park Young Woo, Regional Director, UNEP/ROAP**, yang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Menyoroti peran dan tanggung jawab anggota parlemen dalam merespon tantangan global.
- UNEP memiliki mandat untuk membantu negara berkembang dalam membangun kapasitas sumber daya manusia dalam isu: perubahan iklim, konflik dan manajemen bencana, ekosistem, limbah beracun, efisiensi

sumber daya, environmental governance/sistem institusi pemerintahan yang berwawasan lingkungan.

- Aspek lingkungan berhubungan erat dengan segala aktifitas konsumsi, produksi, dan industri.
- Dalam hal adaptasi dan mitigasi di kawasan Asia Pasifik, diperlukan upaya pengurangan kerentanan, membangun ketahanan masyarakat, dan memfasilitasi akses finansial untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan.
- Manajemen ekosistem UNEP merupakan program yang berupaya untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam aspek kehidupan manusia.
- Manajemen limbah beracun, terutama limbah padat dan limbah kimia, perlu didukung oleh regulasi yang komprehensif.
- Institusi pemerintahan yang berwawasan lingkungan harus memperhitungkan pentingnya mengikutsertakan masyarakat dalam program-program berbasis kemasyarakatan.
- Peran utama payung hukum dan regulasi adalah mengukuhkan wewenang institusi dalam mengimplementasikan kebijakan.
- Peran parlemen dalam mempromosikan *green economy* dan pembangunan berkelanjutan: *representative, legislative, oversight, budgeting, investigating people's aspirations*, dan *ensuring enforcement*.

3) Dr. Kim Jong Hwan, Director, KEITI Korea

- KEITI adalah organisasi publik yang berada di bawah kementerian lingkungan hidup Korea.
- Pada awal periode pembangunan, kerusakan lingkungan merupakan masalah utama di Korea. Sejak tahun 1970an, upaya pelestarian lingkungan terintegrasi dalam agenda nasional.
- Pergeseran prioritas dalam pelestarian lingkungan dimulai dari penghentian polusi hingga pengembangan teknologi bersih.
- Sejak tahun 1985, teknologi ramah lingkungan di Korea telah membantu penurunan polusi udara di Seoul secara signifikan.
- Akses air bersih untuk konsumsi rumah tangga di Korea mencapai 98%.

- Program konservasi telah mengubah sungai menjadi area publik yang aman bagi masyarakat.
- Program penanganan limbah terus meningkat.
- Kontribusi Korea secara global antara lain memfasilitasi *Official Direct Assistance (ODA)* untuk negara-negara berkembang dalam upaya pelestarian lingkungan, termasuk penyediaan air minum bersih di Ghana dan Azerbaijan.
- Tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah meningkatnya emisi kimia dan meningkatnya jumlah pasien yang menderita penyakit lingkungan termasuk penyakit pernapasan seperti asma.
- Partisipasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam menjawab tantangan lingkungan.

4) Dr. Bharat K. Pokharel, Deputy Country Program Director, Helvetas Nepal

- Masyarakat lokal memiliki peran penting dalam upaya pelestarian hutan dan pengentasan kemiskinan.
- Masyarakat lokal dapat merawat hutan dengan lebih baik dibandingkan dengan institusi pemerintah dan sektor swasta.
- Pada periode 1981-1985, tingkat deforestasi Nepal merupakan yang tertinggi di dunia, mencapai 4,1% per tahun. Kebakaran hutan sering terjadi seiring dengan perusakan hutan.
- Dalam waktu kurang dari 30 tahun, masyarakat Nepal telah berhasil mengkonservasi hutan, walaupun di tengah gelombang politik dan instabilitas sosial-keamanan nasional.
- Upaya konservasi hutan Nepal merupakan inisiatif masyarakat lokal yang didukung oleh demokrasi masyarakat.
- Pertambahan penduduk dan pembangunan infrastruktur di daerah sub-urban Nepal tidak diikuti oleh perusakan hutan.
- Masyarakat Nepal telah mempraktekkan usaha agrikultur berbasis kehutanan yang disesuaikan dengan permintaan pasar.

- Pengelolaan sumber daya alam harus diserahkan kepada masyarakat lokal, sementara sektor publik merupakan salah satu aktor yang harus bertanggung jawab dalam pemeliharaan lingkungan.

Kemudian agenda dilanjutkan dengan diskusi. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan antara lain: Bagaimana APPCED dapat memaksimalkan fungsinya dalam mempromosikan upaya pembangunan berkelanjutan; Apa implikasi finansial dari *community-based reforestation program*? Dan siapa yang memberikan motivasi? Bagaimana hubungan antara isu populasi dan pelestarian lingkungan? Populasi selalu bergerak dari waktu ke waktu, misalnya dalam migrasi, bagaimana dinamika populasi mempengaruhi lingkungan?

Delegasi Indonesia, turut berkontribusi aktif dalam sesi tanya jawab dengan menyetujui usulan agar para pembicara juga turut hadir dalam *Drafting Committee Meeting*. Delegasi Indonesia juga sangat tertarik untuk mempelajari bagaimana strategi Nepal dalam memotivasi masyarakat dan siapa yang menggerakkan masyarakat? Karena sebagaimana diketahui di Indonesia, penambahan populasi mendorong peningkatan laju perusakan lingkungan.

Respon pembicara/Hasil Diskusi antara lain :

- UNEP dapat membantu memfasilitasi akses finansial dari negara-negara donor.
- Korea mengimplementasikan regulasi yang ketat dalam mendorong peningkatan pengelolaan lingkungan.
- Para petani tradisional memiliki metode yang lebih ramah lingkungan, sehingga insentif perlu diberikan bagi upaya pelestarian sumber daya alam.
- APPCED harus memaksimalkan perannya dalam menyebarkan *success story* dan *best practices* dalam pelestarian lingkungan.
- Wanita juga harus dilibatkan dalam upaya pelestarian lingkungan dan dalam aktifitas perekonomian.
- Motivator utama dalam gerakan masyarakat lokal di Nepal adalah para politisi yang memiliki perhatian khusus atau terpaksa mengakomodasi kepentingan untuk menghentikan perusakan lingkungan. Para anggota parlemen

memberikan penjelasan bahwa pengelolaan sumber daya alam akan diserahkan sepenuhnya pada para penduduk yang tinggal disekitarnya.

e. Drafting Committee Meeting

Drafting Committee dihadiri oleh satu orang wakil dari negara anggota yang hadir. Setelah melalui diskusi dan perdebatan dalam *Drafting Committee*, Sidang Umum ke-16 *Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED)* akhirnya mengadopsi *Kathmandu Declaration* yang memuat 28 butir pokok hasil sidang.

f. Closing Ceremony

Sebelum acara *Closing Ceremony*, Badan Pariwisata Nepal menyampaikan presentasi tentang potensi pariwisata di Nepal. Selanjutnya, acara *closing ceremony* yang ditutup secara resmi oleh Presiden APPCED, Sekretaris Jenderal APPCED, dan mantan Perdana Menteri Nepal yang sekaligus ditandai dengan penyerahan bendera APPCED kepada Delegasi Iran yang akan menjadi tuan rumah Sidang ke-17 APPCED tahun 2014.

B. PARTISIPASI DELEGASI DPR RI

Dalam *First Plenary*, DPR RI yang diwakili oleh **Sdr. Tantowi Yahya** menyampaikan *Country Report* yang antara lain berisi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam dan biodiversitas tinggi. Banyak penduduk yang mengandalkan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan merupakan tempat bagi tumbuhnya berbagai industri yang juga menyumbangkan ketersediaan lapangan kerja. Perubahan iklim di Indonesia terlihat dari banyaknya perubahan cuaca ekstrem yang mengakibatkan berbagai bencana alam dan resiko lingkungan. Salah satunya adalah ancaman kenaikan permukaan air laut. Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana. Indonesia menyadari resiko yang ditimbulkan akibat perubahan iklim dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Pada 2009, Indonesia meningkatkan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca dari semula 26% menjadi 41% pada tahun 2020. Pembangunan berkelanjutan bersifat multi-dimensi termasuk didalamnya, upaya pemberantasan kemiskinan, pemeliharaan kesehatan, ketersediaan pangan, dan pengembangan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan

beberapa program, antara lain pembangunan hotel ramah lingkungan, pelestarian tanaman bakau, pengembangan sarana transportasi massal, reklamasi lahan tambang, dan R&D dalam *clean technology*.

Dalam *Drafting Committee* yang membahas *Kathmandu Declaration*, Delegasi DPR RI berpartisipasi aktif dalam pembahasan Deklarasi tersebut dengan berhasil mengusulkan beberapa amandemen terhadap *Kathmandu Declaration*, yaitu:

- 1) Mengakomodasi peran sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam mengurangi angka kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja. Delegasi Indonesia merasa perlu untuk mempertegas peran dan kontribusi UKM karena di kawasan Asia-Pasifik, UKM merupakan salah satu elemen yang dapat menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.

Perubahan yang diusulkan merupakan penambahan satu paragraf baru, yang berbunyi:

Recognizing the role of small enterprises (SMEs) as a significant contributor to economic growth and as an important element to distribute welfare, minimize socio-economic gap, and reduce poverty.

Paragraf tersebut disisipkan sebagai paragraf ke-14 *Kathmandu Declaration*.

- 2) Menekankan perlunya riset mendalam terhadap dampak perubahan iklim dan perlunya sistem informasi terpadu dalam mendukung upaya adaptasi terhadap bencana. Setelah mendapatkan masukan dari Delegasi lainnya, paragraf yang disetujui berbunyi:

Encourage the Governments of Asia-Pacific countries to support an advanced research on the impact of climate change and mapping of local vulnerability to support the establishment of information system for disaster preparedness, adaptation measures and to disseminate and transfer proper information to the people who will be mostly affected by climate change by raising the awareness of the people.

Paragraf tersebut disisipkan sebagai paragraf ke-22 *Kathmandu Declaration*.

- 3) Delegasi Indonesia juga menyampaikan perlunya partisipasi sektor swasta dan sektor industri dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan, memanfaatkan, dan menggunakan teknologi ramah lingkungan

serta menghasilkan produk yang memiliki keselarasan dengan alam. Setelah mendapatkan berbagai masukan dari Delegasi lainnya, maka masukan Indonesia tersebut diakomodasi dalam paragraf ke-27 *Kathmandu Declaration* yang berbunyi:

Mobilise adequate resources and regional co-operation to follow sustainable development strategies and actions by raising awareness, strengthening policies and educating the public and private-sectors about the need to promote green economy and industries.

C. Hasil-hasil Yang Dicapai

Sidang ke-16 APPCED ini telah menyepakati *Kathmandu Declaration* yang memuat beberapa poin penting dalam Deklarasi tersebut yaitu :

- *Menegaskan pentingnya peran pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk pemberantasan kemiskinan dan memajukan persamaan gender dan sosial serta sangat mendesaknya pengaturan yang berkesinambungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan tambahan finansial, transfer teknologi, keahlian dan best practices, kerjasama internasional dari dan di luar kawasan;*
- *Bahwa Parlemen mempunyai peran kunci dalam mendorong pemerintah masing-masing negara untuk dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan lingkungan dengan cara-cara yang adil;*
- *Mendukung pemerintah masing-masing untuk mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan oleh UN Convention khususnya UNFCCC, CBD, UNCCD dan meningkatkan usaha-usaha dalam memenuhi target ekonomi;*
- *Mendorong Pemerintah negara-negara di Asia Pasifik untuk mendukung riset lebih mendalam terhadap dampak perubahan iklim dan memetakan local vulnerability guna mendukung pembentukan sistem informasi untuk persiapan bencana, langkah-langkah adaptasi dan menyebarkan serta mentransfer informasi yang tepat kepada masyarakat yang paling rentan terkena dampak dari perubahan iklim dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat;*
- *Memastikan bahwa ada usaha-usaha perbaikan lingkungan secara unilateral dan langkah-langkah pembangunan ekonomi yang diimplementasikan oleh beberapa negara telah mempertimbangkan dampak merugikan yang mungkin terjadi terhadap negara lain, khususnya dalam sektor lingkungan;*

- *Memobilisasi sumber daya alam yang cukup dan kerjasama regional untuk melanjutkan strategi pembangunan berkelanjutan dan aksi-aksi dengan membangkitkan kewaspadaan, penguatan kebijakan dan mendidik masyarakat dan sektor swasta tentang pentingnya meningkatkan green economy dan green industry.*

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Sidang Umum ke-16 *Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED)* telah berlangsung dari tanggal 14 – 18 Januari 2013 di Kathmandu, Nepal telah berlangsung dengan lancar dan sukses.
- b. Sidang telah menghasilkan *Kathmandu Declaration* yang memuat butir-butir pokok yang berisi komitmen untuk mengatasi tantangan-tantangan lingkungan dan pembangunan.
- c. Disepakati bahwa Iran akan menjadi tuan rumah penyelenggara Sidang Umum ke-17 APPCED yang akan dilaksanakan pada bulan April 2014 dan Thailand akan menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-18 APPCED tahun 2015.
- d. Delegasi DPR RI menghadiri semua persidangan sesuai agenda dan program yang telah ditetapkan dan telah berpartisipasi aktif melalui pemaparan *Country Report* maupun pembahasan *Kathmandu Declaration* pada saat *Drafting Committee*.

B. Saran

- a. Hasil-hasil sidang perlu disampaikan kepada Komisi terkait dan diharapkan hasil-hasil Sidang dapat menjadi bahan masukan ketika melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan pasangan kerja atau pembahasan RUU terkait.
- b. Pengiriman delegasi ke Sidang APPCED dapat melakukan persiapan lebih matang terutama substansi dengan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai tema sidang.

IV. PENUTUP

A. Ucapan Terima Kasih

Atas nama Delegasi DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengikuti pelaksanaan *The 16th Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED)* yang berlangsung pada tanggal 14 – 18 Januari 2013 di Khatmandu – Nepal.

Semoga peran DPR RI sebagai peserta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dan kegiatan-kegiatan APPCED di masa yang akan datang.

B. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

1. *Country Reports*
2. *Kathmandu Declaration*
3. Dokumentasi Foto Delegasi Selama Persidangan

C. Kata Penutup

Demikian pokok-pokok laporan Delegasi DPR RI *The 16th Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED)* yang berlangsung pada tanggal 14 – 18 Januari 2013 di Khatmandu – Nepal. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 24 Januari 2013

a.n. Delegasi DPR-RI,

ttd

Juhaini Alie, SH. MM
A-440